

BAB I

PENDAHULUAN

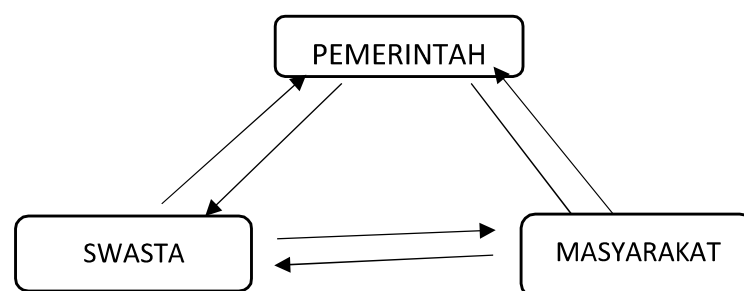
1.1. Latar Belakang

Secara umum, Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai upaya kerja sama antara individu atau organisasi yang saling mendukung satu sama lain dan memutuskan untuk melakukan tindakan terkoordinasi dengan bertukar informasi, manfaat, dan tanggung jawab serta bersama-sama mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama (Saleh, 2020). Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan mengelola program aset, Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai jenis peraturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan non-publik untuk membentuk proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah.

Kebijakan dan kepentingan publik merupakan fokus utama dari kerjasama pemerintah dalam sistem tata kelola pemerintahan dalam menjalankan perannya pemerintah sering kali menghadapi tantangan yang kompleks seperti kemiskinan, krisis kesehatan, ketimpangan sosial dan sebagainya. Pemerintah tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut jika hanya mengandalkan para aparatur negara dan anggaran negara untuk itulah pemerintah memerlukan bantuan dari sektor swasta, organisasi non pemerintah, masyarakat sipil dan kelompok lainnya yang dapat membantu pemerintah dan memberi dukungan kepada pemerintah terutama dalam bentuk finansial. Pemerintah harus mengambil peran yang lebih aktif dalam menangani masalah-masalah publik di era globalisasi saat ini.

Pemerintah yang aktif tidak hanya menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan, tetapi juga menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan tanggung jawab ini dengan mempertimbangkan tuntutan bangsa dan masyarakat saat ini. Selain itu, pemerintah harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Kolaborasi pemerintah dengan para pemangku kepentingan dalam tata kelola pemerintahan diperlukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan upaya dan reaksi pemerintah dalam mengatasi masalah publik, selain tujuan tata kelola pemerintahan (Bila & Saputra, 2019).

Masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah merupakan tiga pemain yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah bukanlah satu-satunya pemain yang mengendalikan tata kelola pemerintahan; aktor-aktor lain juga diperlukan untuk melengkapi sumber daya pemerintah yang terbatas. Para aktor memiliki interaksi timbal balik, bukan interaksi satu arah. Grafik berikut ini menunjukkan para pemain dalam model komunikasi dan kerja sama kolaborasi pemerintah.



Gambar 1. 1. Aktor Kolaboratif Pemerintah

Sumber : (Bila & Saputra, 2019)

Dalam praktiknya, kolaborasi pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti kemitraan publik-swasta, dialog multi-stakeholder, forum diskusi publik, dan kelompok kerja lintas sektor. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi yang efektif, termasuk melalui pembentukan regulasi yang memfasilitasi partisipasi aktif dari berbagai pihak, pembagian pengetahuan dan sumber daya, serta membangun kepercayaan terhadap management pemilik jabatan. Kemudian, pentingnya agar diakui ketika kolaborasi pemerintah juga memiliki tantangan dan hambatan. Perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi, perbedaan budaya organisasi, dan ketidakpastian hukum adalah beberapa faktor yang dapat menghambat keberhasilan kolaborasi tersebut. Karena itu, pemerintah perlu menerapkan tindakan ini. strategi manajemen yang efektif, membangun kolaborasi, dan menciptakan budaya kerjasama (Jacob, 2023).

Dalam era globalisasi dan kompleksitas masalah, kolaborasi pemerintah menjadi semakin penting dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang beragam, pemerintah dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan menciptakan dampak yang nyata untuk kepentingan bersama. Kolaborasi pemerintah juga dapat memperkuat legitimasi dan penerimaan terhadap kebijakan publik. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai pandangan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat mengurangi ketegangan sosial, meningkatkan dukungan

publik, dan memperkuat legitimasi kebijakan yang diimplementasikan (Muhamad & Astuti, 2021).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola potensi daerah dan mensejahterakan seluruh masyarakat yang berada di dalam wilayah pemerintahannya, sesuai dengan hak otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah dituntut untuk mampu mengelola dengan baik seluruh sektor yang terlibat dalam pemberdayaan serta kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pembangunan ekonomi produktif dengan memperluas kesempatan mendapatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Salah satunya dengan mendukung pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. Dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat, diperlukan adanya kolaborasi pemerintah masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi melibatkan partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang beragam, seperti pemerintah, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta (Khasanah et al., 2021).

Melalui kolaborasi, pemangku kepentingan dapat bekerja bersama untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal dan lingkungan. Hal ini membantu memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, kolaborasi memungkinkan penggabungan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan yang berbeda. Misalnya, pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan regulasi, organisasi non-pemerintah dapat menyediakan pengetahuan dan keahlian konservasi, sementara sektor swasta dapat memberikan investasi dan keahlian manajemen. Dalam hal ini pemerintah berperan

sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan sektor swasta. Bekerja sama untuk saling melengkapi dan mencapai hasil yang diinginkan adalah praktik kerja sama dalam pengelolaan ekowisata. Diharapkan bahwa kemitraan ini akan memungkinkan pengelolaan ekowisata yang efektif di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan mengingat bahwa ekowisata penting dalam menjaga keseimbangan lokasi wisata.

Kolaborasi pemerintah menjadi penting dalam pemberdayaan masyarakat karena pemerintah memiliki peran kunci dalam menyediakan kebijakan, regulasi, dan sumber daya yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah dapat memahami kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan berkolaborasi, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan untuk mendorong pemberdayaan atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata. Sementara masyarakat dalam hal ini sebagai pelaku Mereka mendapatkan bantuan keuangan dari sektor publik dan komersial dan secara aktif terlibat dalam administrasi ekowisata. Inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk bekerja sama.

Meningkatkan kemampuan, kepercayaan diri, dan kemandirian seseorang atau kelompok dalam suatu komunitas untuk memilih nasib mereka sendiri dan mempengaruhi lingkungan sosial ekonomi mereka dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat (Endah, 2020). Pemberdayaan pada dasarnya bertujuan menciptakan

kemandirian masyarakat sekitar, dengan menciptakan kemandirian masyarakat maka pembangunan suatu daerah dapat tercapai . Pembangunan pada saat ini tidak menjadi lagi beban pemerintah melainkan perusahaan juga diharapkan mampu melakukan pemberdayaan dan pembangunan di masyarakat sekitar terutama masyarakat pesisir (Putra & Palenti, 2023).

Wilayah pesisir adalah daerah dimana melimpahnya sumber daya alam serta mempunyai potensi wisata alam yang dapat menunjang perekonomian masyarakat pesisir. Namun, di sisi lain, wilayah pesisir juga sering kali rentan terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, kerusakan lingkungan, urbanisasi yang cepat, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan ini, Untuk memberdayakan masyarakat pesisir, kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting. Konservasi dan restorasi hutan mangrove merupakan salah satu strategi yang telah mendapatkan pengakuan internasional untuk meningkatkan keseimbangan ekosistem pesisir (Evi et al., 2023). Hutan mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif, rumah bagi satwa liar, dan penghalang alami terhadap erosi pantai. Menurut Zakyia dan Cindoswari (2018), hutan mangrove menawarkan berbagai jasa lingkungan, seperti habitat, tempat pemijahan, dan sumber nutrisi.

Pengetahuan penulis tentang kondisi genting hutan mangrove Kota Batam berasal dari sumber berita elektronik. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam melaporkan pada tahun 2023, Kota Batam memiliki 13.460,4 hektar ekosistem mangrove dan kawasan hutan. Dari jumlah tersebut

Hampir sebagian besar terdapat di pulau-pulau penyangga Kota Batam, antara lain Pulau Galang, Pulau Bulang, dan Pulau Belakang Padang, dan sebagian kecil terdapat di wilayah Nongsa. (Batampos, 2024) Ekologi hutan mangrove tersebut secara keseluruhan membentang seluas 404 hektar. Hutan lindung (HL) mangrove primer 386,15 hektar, HL mangrove sekunder 4.016 hektar, hutan produksi (HP) mangrove primer 1.683,72 hektar, dan HP mangrove sekunder 6.510,91 hektar merupakan bagian dari ekosistem mangrove utama. Hanya 13% dari jumlah tersebut yang berada di lingkungan mangrove, dibandingkan dengan lebih dari 16.000 di kawasan hutan. Di Kota Batam, antara 25 hingga 30 persen lingkungan mangrove berada dalam kondisi kritis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kritisnya keadaan mangrove di Kota Batam salah satunya yaitu pembangunan dan pengembangan industry perkapalan dan kegiatan reklamasi yang berada tepat digaris pesisir pantai hal ini dapat menyebabkan ekosistem mangrove terganggu (Batampos, 2024)

Kampung Wisata Kampung Tua Bakau Serip merupakan salah satu yang tertua, karena sudah berdiri sejak abad ke-

17. Pemukiman ini dapat ditemukan di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, tepatnya di Kampung Tua Bakau Serip. Pemukiman ini berjarak hampir tiga puluh kilometer dari pusat Kota Batam. Dengan berbagai macam tanaman dan hewan, pelestarian hutan bakau, wisata pantai, dan kesempatan edukasi, Kampung Wisata Kampung Tua Bakau Serip menawarkan wisata alam yang menjanjikan. Menurut Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip di Kota Batam memiliki hutan bakau seluas lebih dari 110 hektar, dengan pohon bakau tertua yang berusia 120 tahun.

pemukiman para warga pulau Batam. Orang tua dulu dikampung ini sangat meyakini bahwasanya hutan mangrove merupakan pelindung kampung dan menajaga rumah para nelayan dari angin kencang dan ombak kuat. Namun belakangan ini pandangan tersebut mulai memudar banyak warga yang menebang hutan mangrove tersebut dengan membabi buta. Kayu nya diambil untuk dijadikan bahan bangunan dan dibuat menjadi arang.

Dengan bantuan dari Pemerintah Kota Batam, sekelompok masyarakat pesisir yang dikenal sebagai Pokdarwis Pandang Tak Jemu mulai mengubah kota ini menjadi tujuan wisata pada tahun 2017. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk melindungi dan melestarikan hutan bakau sekaligus meningkatkan ekonomi lokal dan potensi wisata di dusun wisata tersebut. Organisasi sadar wisata Pokdarwis Pandang Tak Jemu memiliki lima belas anggota tetap dan menerima partisipasi dari penduduk setempat. Pokdarwis memiliki kekuatan sebagai kekuatan utama di balik pariwisata lokal. Pokdarwis, sebuah organisasi swadaya, mempromosikan pariwisata dengan memanfaatkan potensi dan daya cipta desa. Pokdarwis berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan potensi yang dimiliki untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata alam.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, dalam pengelolaan Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat berharap pemerintah dapat memberi perhatian lebih dan dukungan dalam bentuk pelatihan bagi anggota pokdarwis

dalam menyusun paket wisata dan manajemen dalam organisasi. Pemerintah juga diharapkan menyediakan wadah atau ruang diskusi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Selain itu ada beberapa tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan desa wisata ini salah satunya yaitu pencemaran limbah minyak hitam. Banyak minyak hitam yang menempel di pohon bakau kecil menyebabkan banyak sampah yang menempel disana sehingga pohon bakau kecil seringkali patah saat terkena ombak (Yoga, 2023). Bahkan pada tahun 2022 banyak warga yang mengeluhkan mengenai masifnya aktivitas reklamasi yang dapat merusak hutan mangrove. Dampak dari reklamasi tersebut menyebabkan laut menjadi keruh dan dangkal akibat sedimentasi. Dan tangkapan nelayan juga menyusut karena ikan pergi menjauhi kawasan tersebut (Yoga, 2022).

Salah satu alasan pentingnya kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat adalah bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk merancang kebijakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Namun, pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan akses ke lokasi-lokasi terpencil di seluruh Indonesia serta keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah sehingga pemerintah merasa tidak dapat melakukan segala sesuatu hanya sendiri. Inilah mengapa sektor swasta dan organisasi sosial masyarakat sangat penting. Perusahaan swasta seringkali memiliki keahlian dan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur, industri dan pariwisata. Sementara itu, organisasi sosial masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang mendalam dan koneksi dengan masyarakat

Berdasarkan permasalahan diatas diketahui bahwa permasalahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat terutama daerah pesisir utara Kota Batam saat ini belum efektif hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dan keterlibatan dari pemerintah setempat, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ekowisata mangrove serta tidak adanya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat. Maka dari itu ini menjadi penting untuk meneliti penelitian dengan judul “STRATEGI KOLABORATIF PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG TUA BAKAU SERIP KOTA BATAM”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas maka diketahui bahwa terdapat dua masalah utama dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Tua Bakau Serip Kota Batam yaitu:

1. Minimnya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan Kampung Tua Bakau Serip Kota Batam.
2. Tidak adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas maka peneitian ini akan berfokus pada strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya kolaboratif untuk pemberdayaan masyarakat Kampung Tua Bakau Serip Kota Batam. Penelitian

terkait dengan hal-hal lain diluar dari strategi kolaboratif pemerintah perlu dilakukannya penellitian lanjutan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas maka ada dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penellitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi Kolaboratif Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Tua Bakau Serip Kota Batam?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses penerapan Strategi Kolaboratif Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Tua Bakau Serip Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah diatas penellitian ini memiliki dua tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Strategi Kolaboratif Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Tua Bakau Serip Kota Batam.
3. Untuk menganalisis faktor apa saja mempengaruhi proses penerapan Strategi Kolaboratif Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Tua Bakau Serip Kota Batam?

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis:

1. Manfaat Praktis

Dengan menganalisis dan mengidentifikasi Strategi Kolaboratif Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam melihat realitas kolaborasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Tua.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam Good Governance